

## **TINJAUAN YURIDIS JAMINAN KESUNGGUHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MILIK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT USAHA**

Oleh: Javier Carlo<sup>1</sup> Taufiq El Rahman<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan, yang pertama adalah mengetahui kedudukan hukum Jaminan Kesungguhan Eksplorasi milik perusahaan pertambangan eksplorasi sebagai objek jaminan kredit usaha. Tujuan yang kedua adalah mengetahui cara melakukan eksekusi terhadap Jaminan Kesungguhan Eksplorasi sebagai objek jaminan kredit usaha.

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah kombinasi antara metode normatif dan metode empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa jaminan kesungguhan yang disetorkan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan merupakan objek yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh perusahaan pertambangan untuk mendapatkan dana segar dari bank asalkan ada kesepakatan antara debitur dan kreditur sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Lebih lanjut, cara untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan kesungguhan tidak bisa dilakukan menggunakan lembaga jaminan gadai maupun fidusia dikarenakan asas *Inbezitstelling*. Penulis menemukan dalam hal ini, penggunaan jaminan kesungguhan sebagai jaminan di luar lembaga jaminan yang disediakan undang – undang masih bisa dilakukan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, walaupun ada limitasi yang harus diperhatikan. Namun, penulis belum pernah menemukan preseden yang membuktikan bahwa hal ini pernah dilakukan sebelumnya.

Kata Kunci: jaminan kesungguhan, *inbezitstelling*, gadai, fidusia, kebebasan berkontrak

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Skripsi, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

## **JURIDICAL ANALYSIS OF EXPLORATION SERIOUS GUARANTEE OF EXPLORATION MINING BUSINESS LICENSE OF A MINING COMPANY AS A BUSINESS CREDIT SECURITY OBJECT**

By: Javier Carlo<sup>3</sup> Taufiq El Rahman<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

This study has 2 (two) objectives. The first is to determine the legal position of the exploration serious guarantee owned by an exploration mining company as an object of business credit guarantee. The second objective is to determine how to execute the exploration serious guarantee as to the business credit guarantee object.

The research method used in writing this law is a combination of normative methods and empirical methods using primary and secondary data. Primary data is obtained from interviews with respondents, while secondary data is obtained from literature research, including primary, secondary and tertiary sources of law.

Based on the results of the study, the authors found that the serious guarantee deposited to the Directorate General of Mineral and Coal as a requirement to obtain a mining business license is an object that can be used as a credit guarantee by mining companies to obtain fresh funds from the bank as long as there is an agreement between the debtor and creditor following the principle freedom of contract. Furthermore, the way to execute serious guarantees cannot be carried out using a pledge or fiduciary guarantee institution due to the *Inbezitstelling* principle. The author finds that in this case, the use of serious guarantees as collateral outside the guarantee institution provided by law can still be carried out in accordance with the principle of freedom of contract, although there are limitations that must be considered. However, the author has never found a precedent that proves that this has been done before.

Keywords: serious guarantee, *inbezitstelling*, pledge, fiduciary, freedom of contract.

---

<sup>3</sup> Student of the Faculty of Law, Master of Law, Jakarta, Faculty of Law, Gadjah Mada University

<sup>4</sup> Thesis Advisor, Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University